

SKRIPSI

**PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERMENT* A'KIO PADA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GOWA**



OLEH:

MUHAMMAD FALIQUL ISBAH

Nomor Induk Mahasiswa : 105611117420

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* A'KIO PADA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FALIQL ISBAH

Nomor Stambuk: **105611117420**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Penerapan *Electronic Government* A'KIO Pada
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan
Persandian Kabupaten Gowa

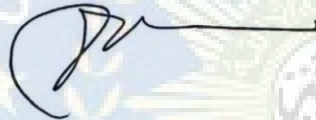
Nama Mahasiswa : Muhammad Faliqul Isbah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611117420

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II



Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si

Mengetahui

Dekan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Ketua Program Studi



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742

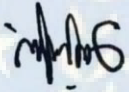
HALAMAN PENERIMAAN TIM

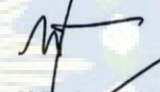
Telah diterima oleh penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0295/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730 727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
4. Hardianto Hawing, S.T., M.A






HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Faliqul Isbah

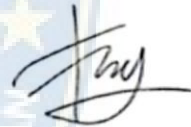
Nomor Induk Mahasiswa : 105611117420

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Faliqul Isbah

ABSTRAK

Muhammad Faliqul Isbah, Penerapan *Electronic Government* A’KIO Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa
(Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Hafiz Elfiansya Parawu)

E-Government atau pemerintahan elektronik adalah bentuk penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya. Semua sistem telah terdigitalisasi, memungkinkan integrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan *Electronic Government* A’KIO Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif tipe deskriptif dengan menggunakan informan yaitu 5 orang. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, serta menggunakan pengebsahan data triagulasi yaitu triagulasi sumber, teknis, dan waktu.

Hasil Penelitian yang ditemukan bahwa penerapan *Electronic Government* A’KIO pada dinas komunikasi informatika yaitu *Support* dilihat dari sisi dukungan dari pemerintah sudah baik melalui kebijakan atau regulasi dan juga pelatihan. *Capacity* dalam penerapan *e-Government* terkait dengan sumber daya manusia yang masih menghadapi kendala adaptasi dari sistem manual ke digital dalam pemahaman teknologi. Namun, ketersediaan infrastruktur yang diperlukan sudah cukup baik. *Value* terkait manfaat yang dirasakan sangat efektif dalam meningkatkan fleksibilitas kerja, dan efisiensi operasional, serta mengurangi waktu, biaya, dan penggunaan kertas dalam administrasi persuratan.

Kata Kunci : Penerapan, *Electronic Government*, pelayanan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul **“Penerapan *Electronic Government* A’KIO Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa”**. Salam dan sholawat taklupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassallam sebagai sangsuri taula dan untuk semua ummat-Nya. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis bersikap positif dalam menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun.

Yang Paling mulia dan teristimewa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Abdul Majid** dan Ibunda **Darmiah** yang senantiasa memberikan semangat, kekuatan, motivasi, perhatian, kasih sayang dan do’a yang paling tulus. Dan untuk keenam saudara saya **Annisa Nur Mutmainnah, Annisa Miftahur Rizki, Annisa Qonita, Annisa Thabqiyatul Ulya, Muhammad Khairul Khaliqillah** dan **Muhammad Aqsa** yang memberikan kekuatan dan semangat hingga akhir studi ini.

Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, berkat kesungguhan, kesabaran, hati yang lapang, kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis berhasil mengatasi tantangan-

tantangan tersebut dengan baik. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, ST. MT.IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nurbiah, S.Sos., M.AP, selaku Sekretaris Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si , selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu, bimbingan, ilmu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si, selaku Dosen pembimbing II, terima kasih atas waktu, kesabaran, dorongan yang sangat luar biasa, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan serta memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh Staf Pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Terima kasih teruntuk Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian telah menerima, membantu dan memberikan informasi serta saran selama proses penelitian ini.
9. Terima kasih teruntuk rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020 terkhusus Kelas ADN E yang terkasih.
10. Teruntuk sahabat-sahabatku Rijalul Khair, Wahyudi, A. Asdar, Haerul Harmin, Fadil Arafah dan Ahmad Fauzi Terima kasih atas semua cerita, kebersamaan, bantuan, dan kenangan yang telah kita bagikan selama ini. dan untuk Nur Latifa Azzahra, Nur Asisa, Nadira, Dewi Maharani, Nurhaya terimakasih senantiasa selalu memberi bantuan, dukungan dan motivasi , selama masa perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih teruntuk rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2020 terkhusus Kelas ADN E yang terkasih.
12. Saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan usaha keras yang telah saya curahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, saya mampu tetap fokus dan berusaha dengan maksimal.

Makassar, 19 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Faliqul Isbah

NIM. 105611117420

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Konsep dan Teori <i>E-Government</i>	14
C. Kerangka fikir	27
D. Fokus Penelitian	28
E. Deskripsi Fokus.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Informan.....	31
D. Teknik pengumpulan data	32
E. Teknik analisis data.....	32
F. Teknik Pengabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Lokasi penelitian	36
B. Alur Kerja e-Disposisi A’KIO	41

C. Hasil Penelitian	44
D. Pembahasan Hasil Penelitian	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77
RIWAYAT HIDUP.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Tingkat Pemahaman SDM Terhadap e-Disposisi A’KIO di Kabupaten Gowa	49
Tabel 4.2 Ketersediaan Infrastruktur Teknologi di SKPD Kabupaten Gowa.....	51
Tabel 4.3 Jumlah disposisi Persuratan Dari Seluruh SKPD Tahun 2023-2024....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DISKOMINFO-SP Kabupaten Gowa.....	40
Gambar 4.2 e-Disposisi A’KIO.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi menawarkan kepada masyarakat beberapa keuntungan yang signifikan. Pegawai negeri saat ini merasa lebih mudah untuk membuat keputusan dalam operasi pemerintah, termasuk tugas-tugas administratif, layanan, dan manajemen data personalia, berkat penggunaan teknologi komputer yang terus meningkat. Tuntutan masa depan terhadap masyarakat yang lebih bervariasi akan membutuhkan pengembangan sistem manajemen baru dengan perusahaan berjejaring untuk mengurangi rantai pengambilan keputusan dan meningkatkan kontrol. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, atau yang biasa dikenal dengan *e-Government*, merupakan salah satu upaya yang dilakukan di era otonomi daerah saat ini untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Pemerintahan tradisional yang identik dengan administrasi berbasis kertas mulai memudar. Salah satu topik kebijakan publik yang saat ini menjadi bahan perbincangan hangat adalah peralihan dari (*traditional Government*) ke *Electronic Government (e-Government)*. Di Indonesia *E-Government* baru dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan sejak tahun 2003. Dalam Undang- Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam bagian menimbang butir dinyatakan :

Bahwa membangun kepercayaan masyarakat dengan pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan pelayananan public merupakan kegiatan yang sangat harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.. Dalam hal ini, tujuan pemerintah untuk memenuhi amanat UUD 1945 untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat telah memunculkan reformasi birokrasi gelombang pertama.

Penerapan adalah segala sesuatu yang dilakukan, baik sendiri maupun bersama orang lain, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat ini merupakan pendapat ahli dalam bahasa penerapan, yang berarti merujuk pada hal, proses, atau hasil penerapan, seperti mempraktikkan, memasang, atau menerapkan.

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah dan akses informasi pemerintah. Hal ini memungkinkan dinas-dinas pemerintah untuk berbagi informasi demi kepentingan public, memfasilitasi transaksi online, dan mendorong pelaksanaan demokrasi(Arifah , 2020). Dimulai dari bentuk pelayanan, *e-Government* diimplementasikan dalam penerapannya yang bersifat langsung, yakni penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis komputer sebagai upaya mendorong keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Implementasi *e-Government* melibatkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendukung praktik sector publik yang lebih efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan proyek pekerjaan publik. Ini berarti bahwa akses publik ke informasi dapat diperoleh lebih cepat, yang mengarah pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam urusan publik (Rahmaini, 2021).

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia menerapkan *E-Government*. Hal ini didukung dengan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*. Instruksi ini mengharuskan seluruh pejabat terkait, baik di pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengembangkan *E-Government* secara nasional. Implementasi *E-Government* dimulai dari layanan sederhana, seperti penyediaan informasi dan data berbasis computer tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan (transparansi) dalam pelayanan publik (Syafriyani & Zaituna, 2019).

Kondisi kehidupan dan zaman dimana segala aktivitas penunjang kehidupan telah dipermudah dengan adanya teknologi seperti saat ini, yang hadir mengubah teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih praktis dan modern, tentu menjadi contoh bagaimana perkembangan komunikasi dan informasi di era teknologi saat ini yang berkembang dengan sangat cepat. Karena kebutuhan dunia berkembang yang modern, Indonesia seperti

halnya negara berkembang lainnya harus bersiap untuk menghadapi persaingan internasional. Organisasi pemerintah tentunya harus menyikapi situasi saat ini dengan cara yang tepat dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kegiatan manusia.

Pemerintah harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya di bidang komunikasi dan informatika agar dapat memenuhi tugasnya untuk memberikan pelayanan dan informasi yang merata kepada seluruh penduduk. Teknologi informasi yang dapat mengelola data dengan cepat, efektif, dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan paradigma pelayanan publik yang disampaikan melalui *e-Government* di sektor pelayanan publik pemerintah.

Persuratan dalam organisasi menjadi hal yang rutin. Begitu pun di pemerintah Kabupaten Gowa. Persuratan merupakan bentuk komunikasi formal antara internal SKPD lingkup Pemkab Gowa maupun dengan pihak eksternal. Tata naskah dinas atau surat dinas, nota dinas disposisi dan lain lain adalah urat nadi yang bertanggung jawab terhadap berjalannya sebuah sistem birokrasi kecepatan lalu lintas. Yang dijalankan melalui sistem korespondensi resmi inilah yang menentukan baik buruknya kualitas layanan birokrasi sebuah lembaga pemerintahan. Aplikasi e-Disposisi A'KIO di Kabupaten Gowa adalah sebuah sistem atau aplikasi berbasis

elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk memfasilitasi proses disposisi surat atau dokumen secara elektronik. Aplikasi ini dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen surat atau dokumen di Kabupaten Gowa.

Komponen yang paling penting dalam hal bantuan atau dukungan adalah dukungan kepemimpinan. Para pemimpin harus memiliki kemauan politik untuk menerapkan proses *e-Government* secara penuh karena hal ini diperlukan untuk pengembangan *e-Government*. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang fase implementasi (tindakan), pemimpin harus menjadi motivator yang unggul selain memiliki kemampuan konsep yang hebat.

Kemampuan/kapasitas mengacu pada unsur pemberdayaan atau kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan *e-Government*. Hal ini mencakup ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan, sumber daya yang memadai untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*, dan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang diperlukan. Nilai/*Value* Dari sudut pandang pemerintah sebagai penyedia layanan, item pertama dan kedua di atas mewakili dua perspektif (sisi penyedia-penyedia). Pelaksanaan *e-Government* tidak ada gunanya jika tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan.

Keberhasilan penerapan *eletronic Government* yaitu e-disposisi A'KIO dapat dilihat dari support atau dukungan dari pemerintah berupa kebijakan atau regulasi yang mengatur penggunaan sistem e-disposisi dan adanya pengadaan sosialisasi terkait penggunaan e-disposisi A;kio,

efisiensi operasional dengan mengurangi waktu untuk pengelolaan surat serta mempermudah tugas administratif yang memudahkan dalam pencarian dan akses dokumen serta keamanan data. Capacity sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan insfratuktur yang mendukung penerapan e-disposisi A'KIO. Dalam konteks ini, tantangan utama terkait sumber daya manusia adalah adaptasi pegawai, peralihan ke sistem digital menjadi kendala. Variasi dan tingkat pemahaman dan keterampilan pegawai di setiap SKPD yang menjadi tantangan signifikan. Ketidakerataan dalam keterampilan ini menjadi faktor krusial yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan penerapan e-disposisi A'KIO.

Adapun hasil observasi yang didapat dalam penerapan *elektronik Government* adalah pada penggunaan e-disposisi A'KIO yang memudahkan dalam merancang persuratan *elektronik* untuk mempermudah dan mempercepat proses disposisi surat secara digital, tapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan persuratan *elektronik* ialah hambatan pada sumber daya manusia yang menggunakan e-disposisi A'KIO salah satunya yaitu pegawai yang kurang familiar dengan perubahan yang dulunya sistem manual ke sistem elektronik.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan *Electronic Government* Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana aspek *support* (dukungan) dalam penerapan *Electronic Government* A’KIO di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana aspek *Capacity* (Kemampuan) dalam penerapan *Electronic Government* A’KIO di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana aspek Value dalam penerapan *Electronic Government* A’KIO di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan, tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui aspek *support* (dukungan) dalam penerapan *Electronic Government* A’KIO di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa?
2. Untuk mengetahui aspek *Capacity* A’KIO (Kapasitas) dalam penerapan *Electronic Government* di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa?

3. Untuk mengetahui aspek *Value* dalam penerapan *Electronic Government A’KIO* di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa?

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Akademis penelitian ini diharapkan berguna sebagai karya ilmiah yang menunjang perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi segenap civitas akademika mengenai perkembangan penerapan *E-Government* khususnya pada Dinas komunikasi informatika dan statistik Kabupaten Gowa .
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Gowa agar lebih maksimal dalam menerapkan dan mengembangkan *E-Government* pada Dinas komunikasi informatika dan statistik Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dengan memilih konsep yang sesuai, penelitian terdahulu bertujuan untuk dapat menetapkan tujuan dan instrumen penelitian. penelitian yang akan dilakukan di masa depan dengan menggunakan penelitian terdahulu. Ringkasan yang terorganisir dari temuan-temuan dari penelitian terdahulu tentang topik yang sedang diteliti disediakan di bagian ini. Adapun beberapa temuan penelitian terdahulu:

1. Yang pertama penelitian yang di lakukan oleh Nadila, Eliyusnadi, dan Eka Septiani pada tahun 2021 mengenai Implementasi *Electronic Government* Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan hasil penelitian ini yaitu Manajemen *Electronic Government* di Kota Sungai Penuh mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi. *Smart Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses kerja untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan seluruh kegiatan pemerintahan. Artinya segala aktifitas Disdukcapil Kota Sungai Penuh semua ditunjang oleh sarana teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan yang diberikan. *Government to*

Citizens/consumers : Disdukcapil Kota Sungai Penuh memberikan pelayanan online kepada masyarakat Kota Sungai Penuh agar masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mengantri di Disdukcapil dan juga sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19. *Government to Business* : Masyarakat mudah mengakses informasi dan persyaratan dalam pelayanan di Disdukcapil. *Government to Governments* : Mempermudah hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah atau Dinas lainnya untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat (Nadila, 2021).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cholillah Suci Pratiwi (2020) “Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open *Government* Di Provinsi Jambi , metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, penelitian ini Saat ini instansi pemerintah di Provinsi Jambi sudah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jambi masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantauan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya, implementasi *e-Government* di Provinsi Jambi baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan *e-Government*, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan

manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung *e-Government*. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup jalan ke arah demokratisasi yang sempurna. Maka untuk meningkatkan pengelolaan *e-Government* pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan sumber daya manusia, merubah kultur atau budaya kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengembangan *e-Government*. Hakekat tujuan diterapkannya *E-Government* adalah agar pemerintah dapat menerapkan suatu praktik yang disebut sebagai good governance berupa suatu kontrak sosial yang menuntut demokratisasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan (Suci Pratiwi, 2020).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yevi Andriani, Sri Suwitri, dan Tri Yuniningsih (2023) “Penerapan *E-Government* Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan , metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek dukungan, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan telah memberikan dukungan penuh terhadap SIKS-NG, meskipun masih terdapat kendala tertentu. Di sisi lain, dalam hal kapasitas, sumber daya finansial dan infrastruktur teknologi masih belum memadai, dan kekurangan tenaga ahli di bidang IT menjadi hambatan.

Namun, manfaat dari SIKS-NG sudah terasa, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengelola data bantuan sosial, walaupun masih ada masyarakat miskin yang belum terdata. Dari tiga indikator diatas disimpulkan bahwa Penerapan *E-Government* Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan belum efektif (Andriani et al., 2023).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Puspa Dewi, Iman Surya, dan Jumansyah pada tahun 2020 mengenai Penerapan *Electronic Government* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan *e-Government* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan sambutan, serta mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan indikator pengembangan *e-Government* yaitu, Support, Capacity, Value. Teknik pengumpulan data dengan sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis model data interaktif dari Miles Huberman, dan Saldana, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun

informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Camat Sambutan, Subbag Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Pelayanan Umum, 2 orang petugas pelayanan di Kecamatan Sambutan dan 10 orang masyarakat pengguna jasa layanan di Kecamatan Sambutan (Dewi, 2020).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Syafriyani dan Yuli Putri Zaituna pada tahun 2019 mengenai Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian : Studi Di BKPSDM Kabupaten Sumenep . Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan *E-Government* dalam pelayanan administrasi kepegawaian di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu 1) E-Leadership, 2) infrastruktur jaringan informasi, 3) pengelolaan jaringan, dan 4) masyarakat dan sumber daya manusia. Subjek penelitian ini informan kunci, utama, dan pendukung, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data yaitu, reduksi data, display data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar penerapan *E-Government* yang berupa SIMPEG telah baik diterapkan. Didukung dengan E-Leadership, pengelolaan informasi serta infrastruktur jaringan informasi yang telah menyediakan seperti adanya Server dan Fitur optic yang berfungsi untuk menyimpan data dan menyediakan jaringan pengelolaan data kepegawaian. Akan tetapi terdapat kendala yang menghambat penerapan *E-Government* yaitu terletak pada pejabat pengelolaan

data di tiap-tiap OPD yang masih kurang memahami teknologi informasi (Syafriyani & Zaituna, 2019).

Beberapa dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan banyak berbagai persamaan. Sedangkan peneliti menemukan perbedaan yaitu objek dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini lebih fokus kepada penerapan *Electronic Government* Pada Dinas Komunikasi Informatika dan statistic Kabupaten Gowa dalam penerapan *Electronic Government* dengan baik di Kabupaten Gowa.

B. Konsep dan Teori *E-Government*

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), *e-Government* semakin populer. Tujuan akhir dari *e-Government* diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, khususnya di bidang pelayanan publik sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga negaranya. Berbagai negara di dunia berlomba-lomba menerapkan *e-Government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik dan geografis masing-masing. Di Indonesia, sejak awal Pertumbuhan *e-Government* masih berada pada tahap awal di abad kedua puluh satu. Pengenalan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat dan perbaikan internal adalah salah satu contohnya.

E-Government merupakan kepanjangan dari *Electronic Government*, atau *E-Gov* sebagaimana sebagian orang menyebutnya. *Electronic Government* merupakan salah satu jenis sistem pemerintahan yang berbasis pada kemajuan

teknologi digital. Ini mencakup semua pekerjaan administratif, pelayanan masyarakat, pemantauan dan penegakan dana pemerintah, transaksi keuangan, undang-undang ketenagakerjaan, tunjangan karyawan, dan fungsi terkait lainnya yang dikonsolidasikan ke dalam satu sistem.

E-Government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology – ICT*). Berbagai Negara di belahan dunia berlomba mengimplementasikan *E-Government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi social politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Di Indonesia, hingga awal dekade 21 perkembangan *E-Government* masih dalam tahap pengenalan (*introduction*). Hal ini ditunjukkan dengan mulai diperkenalkannya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung perbaikan internal dan juga pelayanan masyarakat. *E-Government* merupakan kependekan dari *Electronic Government*, atau ada yang menyebutnya dengan *E-Gov*. *Electronic Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintah yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem (Safitri, 2020).

(Gatti, 2002), mendefinisikan *E-Government* sebagai modernisasi "administrasinegara" dengan menggunakan teknologi komputer. Abramson dan Sarana, (2001) mendefinisikan *E-Government* sebagai informasi pemerintah digital atau cara menarik dalam transaksi digital dengan masyarakat(warga dan bisnis) dan karyawan. Sedangkan Durrant (2002) mendefinisikan *E-Government* sebagai "komitmen permanen oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara warga negara swasta dan sektor publik melalui peningkatan, hemat biaya dan pengiriman efisien layanan, informasi dan pengetahuan"(Safitri, 2020).

E-Government pun didefinisikan oleh Eddy Satriya (2009) dalam (Untari, 2018) yaitu sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintah, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggungjawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat.

Andreas Meier mendefinisikan bahwa *e-Government* yaitu pelaksanaan proses pertukaran informasi dan komunikasi di dalam lembaga pemerintahan dan juga antara lembaga pemerintahan dengan warga atau organisasi dengan menggunakan teknologi elektronik (Vina Nurul Afriani, 2021).

Menurut pakar (Eko Indrajit, 2002) dalam , *e-Government* merupakan sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dari faktor- faktor: sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing- masing negara. Definisi lain menyatakan bahwa *e-Government* adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paling tidak ada empat prinsip dasar pelaksanaan *e-Government* secara umum tercakup dalam visi *e-Government* yaitu :

- 1) Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan memberikan prioritas: (a) Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia, (b) Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, (c) Memungkinkan terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi, setelah menentukan jenis pelayanan, kemudian menentukan ukuran kinerja, yang menjadi target manfaat sebelum menentukan total biaya investasi.
- 2) Membangun lingkungan yang kompetitif, di mana sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan dalam

hal pelayanan publik. Sangat baik jika swasta dan LSM dapat bersaing dengan pemerintah dan dapat melayani dengan lebih baik.

- 3) Memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan pada kesalahan.
- 4) Memusatkan pada pencapaian efisiensi, yang dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pemasukan anggaran dari penggunaan *e-Government* (Yuhefizar et al., 2017).

E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. “*E-Government is the use of information and communication technology (ICT) to promote more efficient and cost-effective Government, more convenient Government services, greater public access to information, and more Government accountability to citizens*”. (*E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan lebih efisien dan pelayanan pemerintah lebih nyaman, akses publik yang lebih besar untuk informasi, dan akuntabilitas pemerintah yang lebih untuk warga pemerintah hemat biaya) (Safitri, 2020).

Dalam Inpres No 3 tahun 2003 *E-Government* adalah sebagai berikut: “*E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif”. Menurut Indrajit (2002): “Bahwa *E-Government* merupakan suatu mekanisme

interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan” (Safitri, 2020).

Secara pokok ada 3 (tiga) sering menjadi sumber distorsi tantangan terbesar yang dihadapi informasi yang mengakibatkan oleh pemerintah maupun masyarakat birokrasi gagal merespon masalah dalam mengembangkan konsep publik secara tepat dan cepat. *Government* di negaranya masing-masing Dwiyanto (2011 : 175) 9 (Indrajit 2004).

- a) Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital (maupun elektronik) dapat secara efektif dalam pengorganisasian organ dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah.
- b) Tantangan yang berkaitan organisasi sektor publik dapat dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah ditempuh dengan menggunakan (pihak komersial swasta teknologi informasi dan komunikasi maupun pihak-pihak non komersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun superstruktur *e-Government* yang dibutuhkan; dan
- c) Tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah hubungan mendasar antara warga biaya investasi dan operasional sehingga program manajemen

perubahan *e-Government* ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan (Mariano, 2019).

Teori elemen sukses pelaksanaan *E-Government* oleh (Indrajit, 2016: 11) yaitu; support, capacity, dan value. Dalam penelitian ini, penulis memakai tiga elemen tersebut dengan tujuan agar dapat memahami pelaksanaan *E-Government*. Tiga elemen ini saling keterkaitan, jika satu di antara yang ada pada tiga elemen tersebut menemukan masalah, akibatnya akan memberikan berdampak dengan elemen yang lain.

- 1) *Support* (Pendukung) Faktor pertama dan terpenting dalam setiap implementasi *e-Government* yaitu Support atau pendukung. Dukungan bagi implementasi *e-Government*, dukungan oleh pemerintah, komunitas, pelaku usaha, ataupun kelompok kepentingan maupun sektor swasta.
- 2) *Capacity* (Kapasitas) Capacity atau kapasitas, ketersediaan sumber daya dalam mengembangkan *E-Government* baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial serta ketersediaan infrastruktur atau sarana ini dinilai sudah sangat baik.
- 3) *Value* (Manfaat) Menurut Indrajit (2016:12), Elemen value berdasarkan pada manfaat yang diperoleh oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat penerima layanan *E-Government* (Lestari & Zulkarnaini, 2023).

Sementara itu, Vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAP memiliki definisi yang cukup unik, yaitu:

“E-Government is a global reform movement to promote internet use by Government agencies and everyone who deals with them” (Indrajit. 2006 : 2).
(*E- Government* adalah gerakan reformasi global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh instansi pemerintah dan semua orang yang berhubungan dengan mereka). *E-Government* adalah tentang penyampaian informasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau alat digital lainnya. *E-Government* didefinisikan sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya (Holmes 2000). Sedangkan penulis lain (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinikan *E-Government* merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis. Sedangkan *E-Government* menurut *The World Bank Group*: *“E-Government refers to the use by Government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet and mobile computing) that have ability to transform*

relations with citizens, business, another arm Government (Dalam Indrajit). Dimana pada intinya *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain) (Mariano, 2019).

E-Government dapat dipahami sebagai pengguna teknologi berdasarkan web (jaringan), komunikasi internet, dan dalam beberapa kasus, merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kinerja dan proses pelaksanaan layanan dan tugas pokok dan fungsinya. Dari rumusan pengertian tersebut bahwa *E-Government* merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan, yakni; (a) meningkatkan efisiensi dan cost-effectiveness dari pemerintahan; (b) memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik; (c) memberikan akses informasi kepada public secara luas; (d) menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab (accountable) dan transparansi kepada masyarakat (Safitri, 2020).

Ada empat hal yang menjadi peran dan diterapkannya *E-Government*, Menurut Anwar (2003) yaitu:

- 1) Terciptanya hubungan secara *E-Government* antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah,
- 2) Melaksanakan perbaikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik.
- 3) Menunjang *good governance* dan kerbukaan,
- 4) Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2006 : 5), telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan di terapkannya konsep *E-Government* bagi suatu negara, antara lain:

- 1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan;
- 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*
- 3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan transaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- 4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan

- 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta
- 6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

E-Government memiliki banyak manfaat guna menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Misuraca (2007) menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi dalam melihat manfaat dari penerapan *E-Government*, yaitu dimensi, ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

- 1) Dimensi ekonomi. Dalam hal ekonomi, manfaat *E-Government* di antaranya yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.
- 2) Dimensi sosial. Dalam hal sosial, manfaat *E-Government* cukup beragam mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan. Pada banyak kasus

manfaat-manfaat ini dapat dievaluasi dalam istilah-istilah politik dan dapat dikuantifikasi dalam istilah keuangan.

- 3) Dimensi pemerintahan. Dalam hal pemerintahan, manfaat *E-Government* dapat meningkatkan tercapainya *good governance* dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan pemerintahan yang konvensional. *E-Government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi yang ada.

Manfaat utama dari *E-Government* seperti yang diidentifikasi oleh Ndou (2004) dalam (Safitri, 2020) adalah:

- 1) Biaya pengurangan dan efisiensi keuntungan (Tapscott, 1996; Amit dan Zott 2001; Malhotra, 2001)
- 2) Kualitas layanan pengiriman ke bisnis dan pelanggan
- 3) Transparansi, antikorupsi, akuntabilitas
- 4) Meningkatkan kapasitas pemerintah
- 5) Jaringan dan penciptaan masyarakat
- 6) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- 7) Promosikan penggunaan ICT di sektor lain dari masyarakat

Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep *e-Government*, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci

menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-governmnet* bagi suatu negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governan*
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Dengan kata lain, negara-negara

maju memandang bahwa implementasi *e-Government* yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum (Indrajit, 2016).

C. Kerangka fikir

Meskipun masih terdapat banyak permasalahan, Aplikasi *Electronic Government* pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Gowa beroperasi dengan cukup lancar karena pada dasarnya sudah tepat sasaran dan dapat memudahkan pengguna layanan berbasis online dalam menangani segala tugas administrasi.

Idealnya, isu-isu tersebut dapat diselesaikan dengan baik agar berbagai kalangan dapat menggunakan layanan *Electronic Government*. Peneliti menggunakan teori (Indrajit 2016) berdasarkan teori dan konsep yang telah dibahas sebelumnya karena mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan penerapan *Electronic Government* Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan uraian di atas kerangka fikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.1 kerangka fikir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bangan kerangka fikir dan fokus penelitian yang berisi pokok kajian yang menjadi pusat perhatian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana penerapan *Electronic Goverment* pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa.

E. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini, yakni:

1. *Support* adalah keinginan dari pimpinan atau publik untuk mendukung penerapan *Electronic Goverment* pada Dinas Komunikasi Informatika

Statistik dan Persandian Kabupaten gowa dan juga kebijakan atau regulasi yang mendukung penerapan *Electronic Government*.

2. *Capacity*, adalah Kemampuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa untuk menerapkan *Electronic Government* termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan insfratuktur.
3. *Value*, adalah manfaat yang diperoleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa dalam menerapkan *Electronic Government*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan oleh penulis dalam pemeriksaan ini yaitu dua bulan setelah seminar pra pemeriksaan. Adapun wilayah atau tempat penelitian ialah di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Gowa perihal Penerapan *Electronic Government* pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas atau frekuensi. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai perangkat penelitian

mengupayakan kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek penelitiannya.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan tentang penerapan *Electronic Government*. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan pada suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikonfirmasi dengan sumber-sumber lain yang relevan. Berdasarkan tujuan penelitian kualitatif, maka prosedur sampling yang penting adalah bagaimana menemukan informasi kunci (key informan). Orientasi mengenai responden adalah bukan berapa jumlah masyarakat yang dijadikan responden tetapi apakah data yang terkumpul sudah mencukupi atau belum.

C. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1	Sabrina Rukka, SE	SK	Kepala Bidang Persandian
2	Ichwan, S.Kom	I	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi

3	Muhammad Ridho F. M	MR	Pranata Komputer Ahli Pertama
4	Nur Taufik Rahman	NT	Staff/Fungsional
5	Rahma	R	Staff/Fungsional bagian umum

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis mengamati, merekam, dan mencatat fenomena atau aktifitas yang sehubungan dengan penerapan *Electronic Government* pada Dinas Komunikasi informatika dan statistik Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan orang yang mampu menjelaskan bagaimana penerapan *Electronic Government* secara lebih jelas.

2. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen tersebut berupa buku-buku, literature.

E. Teknik analisis data

Teknik analisis dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan, studi dokumen dan sebagainya sampai pada penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis

data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung di lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan yang diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan.
2. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan. Namun yang akan paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
3. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validasinya.

F. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan informasi atau data dalam penelitian ini menggunakan teknik *check* dan *recheck* atau bisa disebut dengan teknik triangulasi diantaranya yaitu dengan cara membandingkan data hasil studi pustaka dengan data hasil wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil studi pustaka. Ada 3 teknik Triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triagulasi waktu

Triagulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia perubahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi penelitian

1. Deskripsi Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23).

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa terletak di Jl. Andi Mallombassarang No. 27, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Struktur organisasi dinas ini terdiri dari beberapa bidang yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi khusus. Bidang pertama adalah Bidang Komunikasi dan Informatika, yang bertanggung jawab untuk pengelolaan komunikasi dan penerapan teknologi informasi. Bidang kedua adalah Bidang Statistik, yang fokus pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik. Bidang ketiga adalah Bidang Persandian, yang mengelola aspek keamanan informasi dan enkripsi data. Terakhir, Bidang

Pengelolaan Data dan Informasi bertugas untuk pengelolaan data serta informasi yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan dan keputusan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gowa.

2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa

Visi :

"Mewujudkan Kabupaten Gowa sebagai kabupaten yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah."

Misi :

1. Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang TIK
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui *E-Government*
4. Mengembangkan Konten dan Aplikasi yang Bermanfaat bagi Masyarakat
5. Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan

3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan

Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2. Sekertaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b) pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan Infrastruktur, Teknologi dan Telekomunikasi dan pengelolaan Layanan *E-Government* dan Pengembangan Aplikasi berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang komunikasi publik berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

5. Bidang Statistik.

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas-tugas teknis operasional bidang statistik sektoral, menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan administrasi dibidang statistik sektoral berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat.

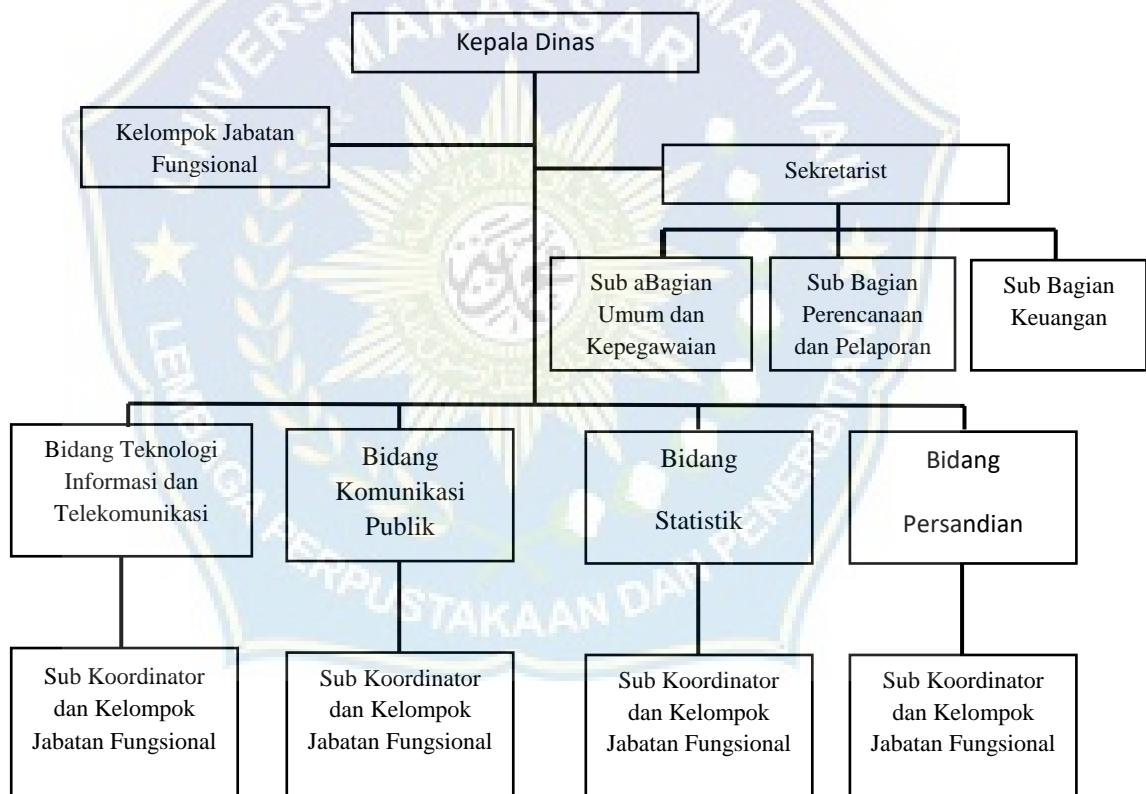
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan dan membantu sebagian tugas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan

Persandian dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang jabatan fungsional.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi DISKOMINFO-SP Kabupaten Gowa



B. Alur Kerja e-Disposisi A’KIO



Sumber: <http://akkio.gowakab.go.id>

1. Staf membuat surat dengan login ke aplikasi A’KIO <http://akkio.gowakab.go.id> menggunakan account yang telah dibuat, kemudian membuat konsep surat keluar dengan menggunakan template surat yang telah ada. Dengan mengisi data pengirim, penerima surat atau lebih serta menentukan jenis naskah surat. Lama waktu yang dibutuhkan 10-15 menit.
2. Selanjutnya pembuat surat menyalin naskah surat, kemudian mengirim surat tersebut kepada pemeriksa pertama untuk mendapatkan persetujuan. . Lama waktu yang dibutuhkan 5 menit.
3. Pemeriksa pertama menerima notifikasi dan dapat langsung merevisi, menolak atau mengembalikan ke pembuat surat, apabila pemeriksa ingin merevisi surat. Pemeriksa surat dapat mengirim revisi surat lalu mengirim

kembali surat kepada pembuat surat. . Lama waktu yang dibutuhkan 15-30 menit.

4. Pembuat surat menerima pemberitahuan untuk merevisi surat kemudian merevisi surat sesuai koreksi yang diberikan oleh pemeriksa surat. Setelah selesai mengembalikan surat ke pemeriksa pertama. Lama waktu yang dibutuhkan 15-30 menit.
5. Surat yang telah direvisi oleh pembuat surat kembali ke pemeriksa tingkat pertama untuk diperiksa kembali. Kemudian dikirimkan ke pimpinan berikutnya. Lama waktu yang dibutuhkan 5 menit.
6. Pemeriksa surat menerima notifikasi kemudian memeriksa surat. Setelah dipastikan suratnya telah final. Maka kepala dinas akan melakukan paraf pada surat tersebut. Dan surat siap untuk dikirimkan ke pimpinan tertinggi. Lama waktu yang dibutuhkan 10-20 menit.
7. Bagian umum sekretaris daerah menerima surat dalam bentuk notifikasi, mengecek surat lalu mengagendakan dan memberi nomor surat. Kemudian mengirimkan ke pimpinan tertinggi untuk ditanda tangan. Lama waktu yang dibutuhkan 10-15 menit.
8. Pimpinan tertinggi menerima surat dalam bentuk notifikasi dan langsung memeriksa surat secara final, kemudian melakukan pembubuhan tanda tangan elektronik. Setelah itu mengembalikan surat ke SKPD pembuat surat untuk segera didistribusikan. Lama waktu yang dibutuhkan 15-30 menit.

9. Pimpinan SKPD pembuat surat menerima notifikasi dan segera mendistribusikan surat yang telah ditanda tangan online. Lama waktu yang dibutuhkan 10-15 menit.
10. Penerima surat akan login di aplikasi A'KIO menggunakan account yang telah dibuat sebelumnya. Lama waktu yang dibutuhkan 10-20 menit.
11. Kemudian surat akan discan hard copy dan di upload ke aplikasi A'KIO, mengisi nomor agenda, asal surat, perihal, no.hp pengirim , sifat surat, dan tujuan surat. Kemudian menentukan tujuan surat penerima surat. Lama waktu yang dibutuhkan 10-15 menit.
12. Pimpinan tertinggi yang akan menerima surat menerima notifikasi dan dapat langsung memeriksa surat. Dilanjutkan dengan melakukan disposisi sesuai tujuan atau perihal surat. Lama waktu yang dibutuhkan 15-30 menit.
13. Pimpinan SKPD menerima notifikasi surat, kemudian memeriksa disposisi surat dan melaksanakan sesuai disposisi yang diberikan oleh pimpinan tertinggi. Lama waktu yang dibutuhkan 15-30 menit.

C. Hasil Penelitian

Penerapan *Electronic Government* Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa

Peneliti melakukan analisis menurut tujuan penelitian yang ingin di peroleh dalam tempat penelitian. Berikut merupakan hasil analisis dari data dan wawancara yang ada di lapangan dengan prespektif teoritis yang akan disesuaikan dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengidentifikasi penerapan *Electronic Government* pada Dinas komunikasi informatika statistik dan persandian Kabupaten Gowa.

1. *Support* (dukungan)

Indikator dukungan merupakan elemen kunci dalam pengembangan *e-Government*, membutuhkan dukungan atau *political will* dari pejabat publik. Adanya support dalam bentuk bimbingan atau pelatihan dalam implementasi elektronik *Government*. Dukungan pemerintah dalam bentuk aturan atau kebijakan sangat penting untuk implementasi *e-Government*. Aturan yang jelas dari pemerintah berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua proses serta inisiatif terkait *e-Government*. Kebijakan ini memastikan adanya standar yang harus diikuti oleh semua instansi dalam penerapan sistem digital di berbagai sektor pemerintahan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan informan MR selaku Pranata Komputer Ahli Pertama sebagai berikut:

“Mengenai kebijakan atau regulasi dalam bentuk dukungan penerapan *Electronic Government* yaitu berupa adanya Perpes Nomor 95 tahun 2018 SPBE tentang SPBE (sisitem pemerintah

berbasis elektronik) yang di dalamnya sudah memuat semua perencanaan *Electronic Government* mulai dari pusat sampai ke daerah dari pemerintah pusat, provinsi sampai di kabupaten". (Wawancara dengan MR Pada tanggal 21 juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan dalam mendukung penerapan *Electronic Government* pada dinas komunikasi informatika dan persandian kabupaten gowa berpedoman pada kebijakan dan regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Salah satu regulasi yang menjadi landasan dalam implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup berbagai aspek seperti tata kelola, insfratuktur, aplikasi, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital dalam pemerintah.

Untuk megetahui lebih jelas komitmen pemerintah terhadap *Electronic Government* berikut peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan informan SK selaku Kabid Persandian sebagai berikut :

“ Terkait komitmen pemerintah terhadap *Electronic Government*, pemerintah Kabupaten Gowa dalam melakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi yaitu memaksimalkan percepatan pelayanan terutama pada adminstrasi persuratan dengan penerapan e-Disposisi A’KIO ini. Dengan adanya e-Disposisi A’KIO di harapkan untuk memudahkan pekerjaan terutama berkaitan dengan administrasi persuratan ” (Wawancara dengan SK pada tanggal 21 juni 2024)

Dari hasil wawancara terungkap upaya Pemerintah Kabupaten Gowa untuk mengadopsi *Electronic Government* dengan menyesuaikan perkembangan teknologi. Salah satu tindakan nyata yang diambil adalah implementasi sistem e-Disposisi A’KIO, yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan

pelayanan. Dengan diterapkannya e-Disposisi A’KIO, diharapkan proses kerja, terutama dalam administrasi persuratan, menjadi lebih sederhana dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah distribusi serta pengelolaan surat-surat dalam lingkungan pemerintahan, sehingga setiap proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan.

Penerapan e-Disposisi A’KIO adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan modern.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan informan IN selaku pranata Komputer ahli sebagai berikut :

“Kalau terkait dukungan atau support dari pemerintah dinas kominfo kabupaten gowa yaitu dengan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan penggunaan e-disposisi A’KIO, yang dimana peserta merupakan perwakilan dari seluruh kantor SKPD untuk dilatih bagaimana cara penggunaan aplikasi e-disposisi A’KIO ini dan pematerinya itu dari dinas kominfo.” (Wawancara dengan IN pada tanggal 21 juni 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah dinas kominfo kabupaten gowa sangat messupport pelatihan penggunaan aplikasi e-Disposisi A’KIO telah dilaksanakan. Pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan dari berbagai kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara menggunakan aplikasi tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam menggunakan teknologi e-Disposisi A’KIO, yang

dirancang untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan serta distribusi surat-menyurat di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan proses administrasi persuratan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan, sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap implementasi aplikasi e-Disposisi A'KIO di Kabupaten Gowa, terlihat bahwa proses penerapan aplikasi ini telah berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, seperti pelaksanaan pelatihan rutin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, dan kelurahan, sangat jelas terlihat. Pelatihan ini tampak dirancang dengan cermat untuk memastikan pemahaman dan kemampuan penggunaan aplikasi e-Disposisi A'KIO secara optimal. Selain itu, sosialisasi kepada berbagai instansi terkait juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mendukung penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Seluruh langkah yang diambil menunjukkan bahwa dukungan dari Diskominfo-SP Kabupaten Gowa terhadap implementasi aplikasi e-Disposisi A'KIO sangat baik.

2. Capacity (Kapasitas)

Indikator *capacity* mencakup sumber daya yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan *e-Government* agar konsep yang telah dirancang dapat terwujud. Sumber daya utama yang harus dimiliki, yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta keahlian yang diperlukan agar implementasi *e-Government* dapat berjalan sesuai dengan

manfaat yang diharapkan. Ketersediaan infrastruktur merupakan elemen kunci dalam penerapan *Electronic Government*, menjamin bahwa layanan digital dapat diakses dengan mudah, aman, dan efisien oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui terkait sumber daya manusia berikut peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan informan SK selaku kabid persandian sebagai berikut :

”Soal penerapan *Electronic Government* yaitu aplikasi e-disposisi A’KIO ini kendalanya itu yang kami hadapi kemarin itu pas pengenalan aplikasi, dikarenakan sebelumnya kami itu terbiasa pakai surat manual. Nah tiba tiba pakai aplikasi, istilahnya orang yang belum tahu pakai hp dipaksa pakai hp itu sangat sulit butuh yang namanya pembiasaan. Bahkan kami juga ikut bimbingan teknis itu sampai 3 kali supaya bisa lancar dalam penggunaan aplikasi karena format surat yang di e-disposisi A’KIO dengan format surat manual itu berbeda. Ada beberapa kode kode yang hanya bisa digunakan di A’KIO tidak bisa digunakan di secara manual seperti itu. Jadi, secara umum pegawai yang paham terkait sistem A’KIO ini hanya sekitar 20%.” (Wawancara dengan SK pada tanggal 24 juni)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *Electronic Government* yaitu e-disposisi A’KIO menghadapi tantangan signifikan saat memperkenalkan aplikasi e-disposisi A’KIO. Kesulitan utama yang muncul adalah adaptasi pegawai yang sebelumnya terbiasa menggunakan surat manual. Peralihan mendadak ke sistem digital ini menjadi tantangan besar, terutama bagi pegawai yang tidak terbiasa. Selain itu, aplikasi e-disposisi A’KIO memiliki beberapa kode khusus yang hanya dapat digunakan dalam sistem tersebut.

Tabel 4.1 Tingkat Pemahaman SDM Terhadap e-Disposisi A’KIO di Kabupaten Gowa

No	SKPD	Jumlah SDM	Jumlah SDM yang Memahami e-Disposisi	Jumlah SDM yang Tidak Memahami e-Disposisi
1	Dinas Pendidikan	150	30	120
2	Dinas Kesehatan	120	24	96
3	Dinas Perhubungan	80	16	64
4	Dinas Kominfo-SP	60	12	48
5	Dinas Sosial	70	14	56
Jumlah		480	96	384
Persentase		100%	20%	80%

Sumber : Data Sekunder Diskominfo-SP Kab.Gowa, 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman sumber daya manusia (SDM) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai sistem e-Disposisi A’KIO masih rendah. Hanya 20% dari total SDM di setiap SKPD yang menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap sistem ini. Secara keseluruhan, dari 480 SDM yang ada di seluruh SKPD Kabupaten Gowa, hanya 96 orang yang benar-benar memahami cara kerja sistem e-Disposisi A’KIO dan dapat mengoperasikannya dengan baik.

Sebaliknya, sebanyak 384 orang, atau 80% dari total SDM, belum memiliki pemahaman yang cukup atau belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan sistem ini. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam hal pelatihan dan pemahaman sistem e-Disposisi A’KIO di

antara sebagian besar SDM. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pelatihan dan pemahaman agar seluruh SDM dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal, guna mendukung efektivitas operasional di seluruh SKPD. Hal senada pula dikatakan MR Mengenai kualitas sumber daya manusia sebagai berikut:

“Kadang hambatannya itu terkait sumber daya manusianya dalam penggunaan e-disposisi A’KIO ini karena di tiap SKPD berbeda, ada setengah paham, bahkan ada yang tidak paham dalam pengeoperasian e-disposisi A’KIO. Jadi kendalanya disitu terkait sumber daya manusianya” (Wawancara dengan MR pada tanggal 21 juni 2024)

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penggunaan aplikasi e-Disposisi A’KIO adalah variasi dalam tingkat pemahaman dan keterampilan pegawai di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beberapa pegawai menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai aplikasi ini, sementara terdapat pula pegawai yang kurang familiar atau bahkan tidak memahami cara mengoperasikan e-Disposisi A’KIO. Perbedaan dalam tingkat pemahaman ini merupakan faktor krusial yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas penggunaan sistem secara menyeluruh. Upaya peningkatan pelatihan dan dukungan teknis akan sangat penting untuk menyelaraskan keterampilan pegawai dan mengoptimalkan implementasi aplikasi e-Disposisi A’KIO di seluruh SKPD.

Tabel 4.2 Ketersediaan Infrastruktur Teknologi di SKPD Kabupaten Gowa

No	SKPD	Jumlah SDM	Jumlah Komputer yang Tersedia	Ketersediaan Jaringan Internet (Ya/Tidak)
1	Dinas Pendidikan	150	50	Ya
2	Dinas Kesehatan	120	60	Ya
3	Dinas Perhubungan	80	40	Ya
4	Dinas Kominfo-SP	60	60	Ya
5	Dinas Sosial	70	17	Ya
Jumlah		480	227	5 SKPD memiliki Akses Internet

Sumber : Data Inventaris Diskominfo-SP Kab.Gowa, 2024

Tabel 4.2 menunjukkan ketersediaan infrastruktur teknologi di lima SKPD di Kabupaten Gowa. Data yang disajikan mencakup jumlah SDM, jumlah komputer yang tersedia, dan ketersediaan jaringan internet. Secara keseluruhan, dari total 480 SDM, tersedia 227 komputer di seluruh SKPD, dengan seluruh SKPD memiliki akses internet.

Berdasarkan data sebelumnya hal ini dipertegas melalui wawancara lanjut yang dilakukan kepada informan I selaku Pranata Komputer terkait ketersediaan infrastruktur sebagai berikut:

“Jadi sekarang ini, ketersediaan infrastruktur dalam penerapan *Electronic Government* di tiap SKPD sudah ada tersedia semua terpusat di Kominfo. Nah terkait komputernya masing masing skpd sudah ada. Sudah ada fasilitasnya masing-masing. Jadi untuk selama ini A’KIO pengoperasiannya lancar.” (Wawancara dengan I pada tanggal 21 juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penerapan *Electronic Government*, infrastruktur yang di perlukan sudah tersedia di setiap SKPD terpusat di dinas kominfo, termasuk komputer-komputer dan fasilitas yang mendukung yang ada di masing-masing skpd. Fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian aplikasi e-disposisi A’KIO telah dipastikan tersedia dengan baik.

Adapaun menurut NT terkait ketersediaan sumber daya insfratuktur dalam penerapan e-disposisi A’KIO :

“Untuk jaringan kami telah memastikan bahwa seluruh kantor di tiap skpd memiliki akses internet yang stabil dan cepat untuk menjamin penggunaan e-disposisi A’KIO dapat berfungsi dengan baik dan di akses dengan mudah oleh semua pegawai.”(wawancara dengan NT pada tanggal 21 juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa seluruh kantor di tiap SKPD telah dipastikan memiliki akses internet yang stabil dan cepat agar e-disposisi A’KIO dapat diakses dengan mudah oleh semua pegawai.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan informan R selaku staff adalah sebagai berikut:

“Pemeliharaan insfratuktur itu biasa dilakukan per minggu itu sering dicek, dari sistem keamanannya untuk maintenance Keamanan. Untuk pembaruan infrastruktur untuk server biasa dilakukan pertahun, pertahun di ajukan tapi biasa ada diacc biasa tidak” (Wawancara dengan RA pada tanggal 21 juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pemeliharaan insfratuktur mingguan, dinas memastikan bahwa sisitem selalu dalam kondisi optimal dan aman dari berbagai ancaman dan juga pemeriksaan

sistem keamanan dan maintenance rutin untuk memastikan keamanan data dan kelancaran operasional. Pembaruan infrastruktur server dilakukan setiap tahun, dengan proposal diajukan untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan pengamatan langsung terhadap penerapan e-Disposisi A'KIO di Diskominfo-SP Kabupaten Gowa, teridentifikasi adanya kebutuhan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Selama pengamatan, ditemukan bahwa sejumlah pegawai di berbagai SKPD belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi e-Disposisi A'KIO. Di sisi lain, fasilitas yang tersedia untuk mendukung operasional aplikasi e-Disposisi A'KIO di setiap SKPD terlihat memadai dan berfungsi dengan baik.

3. Value (Manfaat)

Value dalam penerapan *Electronic Government* yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi manfaat serta dampak dari penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Dengan indikator value dapat dilakukan penilaian terhadap keberhasilan *e-Government* dalam meningkatkan kinerja dan efektifitas terhadap pelayanan administrasi pemerintahan. Manfaat dari penerapan *Electronic Government* seharusnya dapat dirasakan, Jika sistem yang dibangun tidak memberikan manfaat maka tujuan tersebut tidak akan tercapai.

Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dalam penerapan *e-goverement* dengan penggunaan e-disposisi A'KIO berikut peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan informan SK selaku Kabid Persandian sebagai berikut :

“Menurut saya pribadi dengan adanya e-disposisi A’KIO ini sudah banyak mempermudah. Yang paling pertama kemudahannya adalah kita bisa bekerja di mana saja dan kapan saja kan kalau sebelumnya secara non digital kita kalau mau bikin surat atau segala macam mesti di kantor, terus kemudian jelas di kantor itu kita harus pakai laptop yang sama. Karena kalau kapan kita pakai laptop yang beda filenya juga berbeda. Nah sekarang kalau pakai e-disposisi A’KIO biarpun kita pakai laptop yang berbeda dan tempat yang di mana saja kita tetap bisa melaksanakan akses persuratan itu dari admin. Kalau dari pimpinan sendiri kami lihat bahwa yang namanya pimpinan jadwalnya fleksibel dan jarang ada di kantor walaupun di kantor mungkin waktunya cuman sebentar. Dengan adanya e-disposisi A’KIO biarpun pimpinan tugas keluar atau dinas luar tetap bisa melakukan persuratan seperti itu.” (Wawancara dengan SK pada tanggal 24 juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam wawancara tersebut, narasumber menjelaskan bahwa penggunaan teknologi digital, terutama sistem e-disposisi seperti A’KIO, telah menghadirkan berbagai kemudahan. Salah satu keutamaannya adalah fleksibilitas dalam menjalankan pekerjaan. Sekarang, tidak lagi diharuskan berada di kantor atau menggunakan laptop yang sama untuk membuat surat atau dokumen dan para pimpinan memiliki jadwal yang fleksibel. Meskipun jarang berada di kantor dan hanya singkat waktu di sana, penggunaan sistem persuratan digital memungkinkan mereka tetap menjalankan tugas administratif, termasuk saat berada di luar kantor atau sedang dalam perjalanan dinas.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan informan MR selaku Pranata Komputer Ahli sebagai berikut :

”Yang kami lihat dengan adanya e- disposisi A’KIO ini ada percepatan percepatan. Dari segi kinerja dari sini dari segi efisiensi semua ada peningkatan karena dengan adanya kita tidak perlu menunggu surat. Yang biasanya surat itu lama ada di mejanya pejabat, apa karena pejabat dia tidak ada atau tugas luar atau

“mungkin lagi ada kendalanya. Nah dengan adanya e-disposisi A’KIO hal itu bisa di eliminasi semua. Jadi dia hitungan menit saja sudah bisa kita dapatkan kita punya surat yang kita butuhkan seperti itu.” (Wawancara dengan MR pada tanggal 21 juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-disposisi A’KIO di instansi ini telah membawa berbagai percepatan dan peningkatan efisiensi. Sistem ini mengeliminasi kebutuhan untuk menunggu surat secara fisik yang sering kali tertunda di meja pejabat karena berbagai alasan seperti ketidakhadiran atau tugas luar. Dengan e-disposisi A’KIO, surat yang diperlukan dapat diterima dalam hitungan menit, sehingga mempercepat kinerja dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Adapun menurut R terkait manfaat penerapan e-disposisi A’KIO bagi Dinas Komunikasi Informatik Statistik Dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“Dengan adanya e-disposisi A’KIO ini memang sangat membantu, memang kalau sudah diterapkan sistem online untuk dibandingkan dengan sebelumnya, terutama dalam pencarian pencarian arsip. Kalau dulu sebelum ada A’KIO itu susah sekali kalau mencari arsip secara manual, dicari kertas kertasnya. Tapi kalau sekarang, tinggal *searching* di aplikasi Langsung dapat terus kemudahan lainnya proses persuratan itu jadi cepat.”(Wawancara dengan R pada tanggal 21 juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan sistem online, terutama e-disposisi A’KIO, banyak manfaat yang dirasakan, dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Khususnya dalam hal pencarian arsip, sebelum adanya e-disposisi A’KIO, pencarian arsip secara manual sangat sulit dan memakan waktu karena harus mencari kertas-

kertas arsip satu per satu. Sekarang, setelah menggunakan e-disposisi A’KIO pencarian arsip menjadi sangat mudah dan cepat dengan hanya melakukan pencarian (*searching*) di aplikasi.

Adapun hal yang MR dikatakan mengenai manfaat penerapan *Electronic Government* terkait keamanan arsip sebagai berikut :

“Kalau untuk keamanan arsip surat itu, kan ini disimpan di server internalnya kami diskominfo dan ada satu bidang sendiri yang untuk menjaga security sistemnya itu sistem server. Jadi untuk keamanan ya bisa dikatakan sudah bagus.”(Wawancara dengan MR pada tanggal 21 juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keamanan arsip surat dalam sistem e-disposisi A’KIO sudah terjamin dengan baik. Arsip surat disimpan diserver internal Dinas Komunikasi Informatika, yang memberikan kontrol penuh terhadap data yang disimpan. Ada satu bidang khusus yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem dan server, memastikan bahwa data dan arsip terlindungi dengan baik.

Hal yang sama dikatakan I mengenai keamanan arsip sebagai berikut :

“Terkait keamanan arsip dan transparansi dari e-disposisi A’KIO ini, saya lihat dia sudah cukup bagus, terutama setiap surat yang kita buat itu bisa ter-tracking bahwa posisinya di mana sudah dibaca atau belum suratnya. Dia di detik keberapa dan sama siapa terakhir dan itu tersimpan semua. Bahkan saya juga ada yang sampai tahun awal itu kita terapkan 2022 masih tersimpan juga riwayatnya semua. Makanya saya dari segi transparansi dan dari segi arsip kami rasa sudah cukup. Walaupun namanya aplikasi kan tetap perlu banyak peningkatan dan peningkatan tapi untuk sekarang ini sudah sangat lebih dari cukup menurut saya seperti itu.” (Wawancara dengan I pada tanggal 21 juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa keamanan arsip dan transparansi dalam e-disposisi A’KIO sudah sangat baik,

memungkinkan pelakacakan setiap surat secara detail, termasuk status, waktu, dan penerima terakhir, serta penyimpanan riwayat sejak awal penerapannya pada tahun 2022, meskipun tetap perlu peningkatan lebih lanjut.

Berdasarkan pengamatan langsung terhadap penerapan e-Disposisi A’KIO, manfaat dari penggunaan aplikasi ini tampak sangat positif. Seluruh SKPD yang mengimplementasikan aplikasi e-Disposisi A’KIO telah mengalami peningkatan dalam efisiensi proses persuratan antar instansi, yang sebelumnya menggunakan sistem berbasis kertas dan memerlukan waktu yang cukup lama. Penggunaan aplikasi ini berhasil mempercepat dan mempermudah proses persuratan. Selain itu, data terkait jumlah disposisi persuratan yang diproses oleh seluruh SKPD mendukung efektivitas manfaat yang diperoleh dari penerapan e-Disposisi A’KIO.

Tabel 4.1 Data Jumlah Disposisi persuratan Dari Seluruh SKPD Tahun 2023-2024

Nama Unit	Kode	Jumlah surat
Asisten Administrasi Umum	ASISTEN_ADMINISTRASI	79
Asisten Ekonomi dan Pembangunan	ASISTEN_EKONOMI	11
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	ASISTEN_PEMERINTAHAN	11
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	BAG_BARJAS	657
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	BAG_EKONOMI	4
Bagian Hukum	BAG_HUKUM	7
Bagian Kerjasama	BAG_KERJASAMA	26

Bagian Kesejahteraan Rakyat	BAG_KESRA	34
Bagian Organisasi	BAG_ORGANISASI	34
Bagian Tata Pemerintahan	BAG_PEMERINTAHAN	54
Bagian Perencanaan dan Keuangan	BAG_PERENCANAAN	4
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	BAG_PROTOKOL	12
Bagian Umum	BAG_UMUM	650
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	BALITBANG	125
Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA	531
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	1065
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BKPSDM	1383
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	24
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	806
Kabupaten Gowa	BUPATL_GOWA	5791
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	DAMKAR	351
Dinas Kesehatan	DINKES	2061
Dinas Sosial	DINSOS	3096
Dinas Pendidikan	DISDIK	4335
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL	221
Dinas Perhubungan	DISHUB	178
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	DISKOMINFO	1357
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DISKOPERASI	44
Dinas Lingkungan Hidup	DISLH	960
Dinas Perkebunan dan Peternakan	DISNAKBUN	1428
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DISNAKER_TRANS	384
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DISPAR_BUD	500
Dinas Perikanan dan Kelautan	DISPERIKANAN	314
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DISPERPUS	224

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DISPMD	647
Dinas Pemuda dan Olahraga	DISPORA	185
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DISPPKB	443
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DISPPPA	217
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DISPUPR	3268
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	DISTANAMANPANGAN	1175
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	391
Sekretariat DPRD	DPRD	46
Inspektorat	INSPEKTORAT	309
KECAMATAN BAJENG	KEC_BAJENG	7
KECAMATAN BAJENG BARAT	KEC_BAJENGBARAT	1
KECAMATAN BAROMBONG	KEC_BAROMBONG	13
KECAMATAN BIRINGBULU	KEC_BIRINGBULU	37
KECAMATAN BONTOLEMPANGAN	KEC_BONTOLEMPANGAN	73
KECAMATAN BONTOMARANNU	KEC_BONTOMARANNU	66
KECAMATAN BONTONOMPO	KEC_BONTONOMPO	11
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN	KEC_BONTONOMPOSELATAN	58
KECAMATAN BUNGAYA	KEC_BUNGAYA	133
KECAMATAN MANUJU	KEC_MANUJU	80
KECAMATAN PALLANGGA	KEC_PALLANGGA	11
KECAMATAN PARANGLOE	KEC_PARANGLOE	156
KECAMATAN PARIGI	KEC_PARIGI	30
KECAMATAN PATTALASSANG	KEC_PATTALASSANG	117
KECAMATAN SOMBA OPU	KEC_SOMBAOPU	482
KECAMATAN TINGGIMONCONG	KEC_TINGGIMONCONG	72
KECAMATAN TOMBOLOPAO	KEC_TOMBOLOPAO	161

KECAMATAN TOMPOBULU	KEC_TOMPOBULU	356
Kelurahan Bonto-Bontoa Kec Somba Opu	KEL BONTOBONTOA	137
KELURAHAN BONTOMANAI	KEL BONTOMANAI	10
KELURAHAN BONTORAMBA	KEL BONTORAMBA	41
KELURAHAN KALASERENA	KEL KALASERENA	426
Kelurahan Katangka Kec Somba Opu	KEL KATANGKA	15
KELURAHAN MANGALLI	KEL MANGALLI	15
KELURAHAN MAWANG	KEL MAWANG	1
Kelurahan Paccinongang Kec Somba Opu	KEL PACCINONGANG	36
Kelurahan Pandang-Pandang Kec Somba Opu	KEL PANDANGPANDANG	75
KELURAHAN PANGKABINANGA	KEL PANGKABINANGA	10
Kelurahan Romang Polong Kec Somba Opu	KEL ROMANGPOLONG	585
Kelurahan Samata Kec Somba Opu	KEL SAMATA	251
Kelurahan Sungguminasa Kec Somba Opu	KEL SUNGGUMINASA	106
KELURAHAN TAMALLAYANG	KEL TAMALLAYANG	766
Kelurahan Tombolo Kec Somba Opu	KEL TOMBOLO	1415
Kelurahan Tompobalang Kec Somba Opu	KEL TOMPOBALANG	1
Kelurahan Bontolerung Kec. Tinggimoncong	KEL_BONTOLERUNG	125
KELURAHAN BONTOPARANG KEC. PARANGLOE	KEL_BONTOPARANG	406
Kelurahan Bontoramba Kec. Bontonompo Selatan	KEL_BONTORAMBA	22
KELURAHAN BULUTANA KEC. TINGGIMONCONG	KEL_BULUTANA	602
Kelurahan Cikoro Kec. Tompobulu	KEL_CIKORO	3
Kelurahan Gantarang Kec. Tinggimoncong	KEL_GANTARANG	260
Kelurahan Garassi Kec. Tinggimoncong	KEL_GARASSI	210
KELURAHAN LANNA KEC. PARANGLOE	KEL_LANNA	41

Kelurahan Malakaji Kec. Tompobulu	KEL_MALAKAJI	369
KELURAHAN MALINO KEC. TINGGIMONCONG	KEL_MALINO	145
Kelurahan Parangbanoa Kec. Pallangga	KEL_PARANGBANOA	6
Kelurahan Pattapang Kec. Tinggimoncong	KEL_PATTAPANG	80
Kelurahan Sapaya Kec. Bungaya	KEL_SAPAYA	337
Kelurahan Tamaona Kec. Tombolopao	KEL_TAMAONA	14
Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga	KEL_TETEBATU	16
KELURAHAN TONRORITA KEC. BIRINGBULU	KEL_TONRORITA	152
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	218
Dinas Ketahanan Pangan	KETAPANG	214
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	PERDASTRI	746
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PERKIMTAN	390
RSUD Syekh Yusuf	RSUD	2474
Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOLPP	154
Sekretariat Daerah	SEKDA_GOWA	3766
Kabupaten Gowa	WABUP_GOWA	334
JUMLAH		50280

Sumber: Diskominfo SP Kabupaten Gowa

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003, penerapan *Electronic Government* untuk layanan public membutuhkan Berbagai Strategi. Salah satunya adalah membangun *Electronic Government* Secara Terstruktur dengan tujuan dan langkah-langkah yang dapat diukur, sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh semua pihak.

E-Disposition A’KIO adalah sistem digital yang dikembangkan untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi persuratan di dalam tata laksana pemerintahan, khususnya di kabupaten Gowa. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual dalam pengelolaan disposisi surat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan e-disposisi A’KIO, seluruh proses mulai dari penerimaan, pencatatan, distribusi, hingga tindak lanjut surat dapat dilakukan secara elektronik.

1. *Support* (dukungan)

Menurut Indrajit *Support* (Pendukung) Faktor pertama dan terpenting dalam setiap implementasi *e-Government* yaitu *Support* atau pendukung. Dukungan bagi implementasi *e-Government*, dukungan oleh pemerintah, komunitas, pelaku usaha, ataupun kelompok kepentingan maupun sektor swasta.

Dukungan merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mendukung penerapan *Electronic Government*. Kebijakan yang mendukung penerapan *e-Government* di Kabupaten Gowa sangat penting. Ini termasuk peraturan yang mendukung digitalisasi layanan publik dan kerangka kerja hukum yang jelas untuk melindungi data dan privasi.

Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) sesuai dengan teori menurut indrajit memberikan dukungan dengan menerapkan disposisi A’KIO yang memudahkan setiap

instansi dalam melakukan surat persuratan, memberikan landasan yang kuat untuk penerapan *e-Government* di Kabupaten Gowa. Dukungan dari kebijakan dan regulasi ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan *e-Government*, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di pemerintahan Kabupaten Gowa.

Dukungan dari pemerintah Kabupaten Gowa menunjukkan adanya *political will* yang kuat untuk mengimplementasikan *Electronic Government*. Komitmen ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan melalui inovasi teknologi.

Pemerintah Kabupaten Gowa menerapkan sistem e-disposisi A’KIO untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengelolaan persuratan, membuatnya lebih efisien dan efektif. Hal ini juga memungkinkan distribusi dan pengelolaan persuratan yang lebih cepat dan lebih mudah di lingkungan pemerintah, sehingga administrasi lebih efisien dan transparan. Implementasi e-disposisi A’KIO adalah bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Gowa untuk Berinovasi dan Beradaptasi dengan kemajuan teknologi, memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Gowa memiliki peran penting dalam mendukung penerapan aplikasi e-disposisi A’KIO. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelatihan dan sosialisasi yang intensif kepada para pegawai mengenai penggunaan aplikasi ini. Pelatihan tersebut bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengelolaan persuratan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelatihan ini menjadi langkah strategis yang signifikan dalam memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan dapat memanfaatkan aplikasi e-disposisi A'KIO secara optimal. Dengan meningkatkan keterampilan SDM, diharapkan bahwa aplikasi ini dapat digunakan secara efektif untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen.

Sehingga, penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian Cholillah Suci Pratiwi (2020) mengenai implementasi *e-Government* pada situs web pemerintah di Provinsi Jambi. Pratiwi menemukan bahwa inisiatif pemerintah Jambi dalam mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi, seperti penggunaan situs web, adalah langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis open *Government*. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan pelayanan publik (Nadila, 2021).

Seperti halnya Provinsi Jambi yang memanfaatkan situs web untuk pelayanan publik, Kabupaten Gowa melalui Dinas Kominfo juga memanfaatkan aplikasi e-disposisi A'KIO untuk memperbaiki proses administrasi. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi

merupakan kunci keberhasilan implementasi *e-Government*. Pemerintah tidak hanya menyediakan infrastruktur teknologi, tetapi juga memastikan bahwa pegawai memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi tersebut dengan baik, guna mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan terbuka.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Menurut Indrajit *Capacity* (Kapasitas) ketersediaan sumber daya dalam mengembangkan *E-Government* baik sumber daya manusia serta ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana ini dinilai sudah sangat baik.

Keberhasilan pelaksanaan suatu penerapan *Electronic Government* sangat bergantung pada kapasitas, yaitu sumber daya manusia dan infrastruktur yang dapat mendukung kelancaran penerapan *Electronic Government*. Menurut Hamali sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya, hal ini berhubungan dengan teori indrajit yang sudah mengembangkan *E-Government* melalui disposisi A'KIO dalam melakukan surat persuratan secara online dengan mengembangkan sarana prasarana yang memungkinkan dalam menggunakan aplikasi disposisi A'KIO serta melakukan pelatihan kepada SDM (Sumber Daya Manusia) agar bisa mengaplikasikan aplikasi ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Gowa pada indikator sumber daya

yaitu ketersediaan sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam penerapan *e-Government*. Adanya sumber daya manusia yang memadai akan mendorong pengembangan dan implementasi *E-Government*. sebaliknya, jika sumber daya manusia yang tersedia tidak memenuhi harapan sebagaimana hasil yang tercantum pada tabel 4.1 yang menunjukkan ketidakpahaman pegawai SKPD di Kabupaten Gowa sebesar 80%, hal ini dapat menghambat pengembangan *e-Government*. Dalam penerapan *Electronic Government* yaitu e-disposisi A'KIO salah satu tantangan terkait sumber daya manusia yaitu adaptasi pegawai yang sebelumnya terbiasa menggunakan surat manual, peralihan ke sistem digital ini menjadi kendala besar, terutama bagi pegawai yang tidak terbiasa dengan teknologi. Tantangan signifikan lainnya adalah variasi dalam tingkat pemahaman dan keterampilan pegawai di setiap SKPD. Beberapa pegawai memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan aplikasi, namun ada juga yang kurang familiar atau bahkan tidak memahami cara mengoperasikan e-disposisi A'KIO. Ketidakmerataan dalam keterampilan ini menjadi faktor krusial yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan penerapan *Electronic Government*.

Dalam hal infrastruktur, penelitian ini menemukan bahwa kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan e-disposisi A'KIO sudah tersedia di setiap SKPD dan terpusat di dinas Kominfo-SP yang mencakup perangkat komputer dan fasilitas pendukung untuk pengoperasian aplikasi telah dipastikan tersedia dengan baik, sehingga pegawai dapat mengakses

dan menggunakan aplikasi tanpa hambatan di tiap SKPD. Ketersediaan jaringan internet yang memadai sangat penting agar aplikasi e-disposisi A'KIO dapat di akses dengan mudah untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas adminnistrasi. Dinas kominfo juga melakukan pemeliharaan insfratuktur secara mingguan untuk memastikan bahwa sistem selalu dalam kondisi optimal dan aman dari berbagai ancaman.

Penelitian ini berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Syafriyani dan Yuli Putri Zaituna (2019) mengenai penerapan *E-Goverment* dalam pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian tersebut, aspek infrastruktur jaringan informasi dan pengelolaan jaringan juga menjadi fokus utama dalam mendukung penerapan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) di Kabupaten Sumenep (Syafriyani & Zaituna, 2019). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur seperti server dan fiber optik yang berfungsi untuk menyimpan data dan menyediakan jaringan sangat penting untuk mendukung kelancaran pengelolaan data kepegawaian. Namun, kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman teknologi informasi oleh pejabat pengelola data di tiap-tiap OPD dalam hal ini yaitu Sumber Daya Manusianya (SDM), yang menghambat penerapan *e-Goverment* secara optimal.

Dengan berbagai upaya ini, meskipun terdapat tantangan dalam penerapam e-disposisi A'KIO, Dinas Kominfo Kabupaten Gowa telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi kendala tersebut dan

meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan *Electronic Government*.

3. *Value* (Manfaat)

Menurut Indrajit (2016:12), Elemen value berdasarkan pada manfaat yang diperoleh oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga setiap instansi penerima layanan surat persuratan *e-Government* melalui e-disposisi A'KIO. Menurut Heeks (2006) menyatakan Value dalam konteks *e-Government* diukur berdasarkan seberapa efektif teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi administratif, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Penerapan *e-Government* akan menjadi sia-sia dan tidak efektif jika para pemangku kepentingan tidak merasakan manfaat yang ditawarkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa *E-Government* diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu hal ini dapat dikatakan sesuai dengan teori indrajit dalam Penerapan *E-Government* melalui e-disposisi A'KIO surat persuratan Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Gowa yaitu penerapan e-disposisi A'KIO ini dilihat dari segi manfaat sudah dirasakan oleh seluruh instansi pemerintah Kabupaten Gowa sehingga memudahkan setiap instansi melakukan persuratan hanya melalui aplikasi atau website yang dibuat oleh pemerintah.

Penggunaan *E-Government*, khususnya sistem *E-Government* seperti e-disposisi A'KIO telah memberikan banyak manfaat termasuk fleksibilitas

dalam pengaturan kerja, menghilangkan kebutuhan untuk penyimpanan fisik dan memungkinkan pemulihan surat dengan cepat.

Sistem e-disposisi A'KIO menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan metode manual, seperti manajemen yang lebih cepat, efisiensi yang lebih baik, dan peningkatan transparansi serta akurasi dalam penanganan dokumen. Dalam sistem ini, akurasi manajemen persediaan menjadi lebih baik karena sistem elektronik memberikan kontrol data yang lebih ketat, memastikan data dan persediaan dokumen disimpan dengan benar. Transparansi yang dihasilkan dari e-disposisi A'KIO memberikan informasi rinci tentang setiap surat, termasuk status, waktu, dan langkah-langkah sebelumnya, yang membantu meningkatkan akuntabilitas.

Penerapan e-disposisi A'KIO juga secara signifikan meningkatkan efisiensi proses administrasi dengan menggantikan metode manual yang memakan waktu dengan sistem otomatis. Penggunaan digitalisasi dokumen dan proses mengurangi kebutuhan akan kertas, tinta, dan penyimpanan fisik, sehingga menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan juga dicapai, yang secara langsung mengurangi beban anggaran dinas-dinas terkait. Meskipun demikian, untuk memastikan sistem ini tetap efektif dan efisien, perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadila, Eliyusnadi, dan Eka Septiani (2021) tentang implementasi *e-Government* dalam mendukung *good governance* dan *smart city* di Kota Sungai Penuh.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintahan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik dan efisiensi administrasi (Nadila, 2021). Dalam studi tersebut, Disdukcapil Kota Sungai Penuh menggunakan teknologi informasi untuk mendukung proses kerja dan memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat, seperti dalam pelayanan online yang mengurangi antrian dan mempercepat penanganan administrasi.

Penerapan smart *Government* di Kota Sungai Penuh, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi, memiliki kemiripan dengan sistem e-disposisi A'KIO di Kabupaten Gowa. Kedua sistem tersebut berfokus pada penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan proses administrasi dan meningkatkan transparansi serta akurasi, baik dalam hubungan antar pemerintah (G2G) maupun dalam pelayanan kepada masyarakat (G2C). Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pemerintahan tidak hanya mendukung efisiensi administrasi internal, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Dengan penerapan sistem seperti e-disposisi A'KIO dan smart *Government*, pemerintahan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Meskipun tantangan tetap ada, seperti kebutuhan untuk terus meningkatkan kompetensi SDM dan memastikan infrastruktur yang memadai, arah penerapan teknologi dalam pemerintahan

menunjukkan potensi besar untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih modern.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. *Support* (Dukungan), dalam indikator ini dapat dilihat bahwa Dinas Kominfo menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung penerapan aplikasi e-disposisi A’KIO yaitu penyelenggaraan pelatihan penggunaan aplikasi e-disposisi A’KIO untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam menggunakan e-disposisi A’KIO. Penerapan *E-Government* dalam penggunaan e-disposisi A’KIO sudah berhasil dengan adanya dukungan pemerintah dalam memberikan dukungan. Dukungan yang efektif sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan keberhasilan. Dukungan yang diberikan dengan tepat waktu dan relevan dengan kebutuhan dapat meningkatkan motivasi, mengurangi stres, dan mendorong pencapaian tujuan.
2. *Capacity* (kapasitas), kapasitas dalam penerapan aplikasi e-disposisi A’KIO pada Dinas Komunikasi informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa cukup baik namun memerlukan adanya beberapa peningkatan yaitu pada sumber daya manusia yang masih memerlukan adaptasi oleh pegawai dari sistem manual ke digital dalam pemahaman

teknologi dan mengenai ketersediaan infratuktur yang diperlukan termasuk perangkat komputer dan jaringan internet sudah cukup baik. Kapasitas yang memadai sangat penting untuk memastikan individu atau organisasi dapat menjalankan tugas mereka secara efektif. Kapasitas yang kuat memungkinkan respon yang cepat dan adaptif terhadap tantangan, sementara kapasitas yang terbatas dapat menghambat kemajuan dan pencapaian tujuan.

3. *Value* (Manfaat), manfaat yang diperoleh dalam penerapan aplikasi e-disposisi A'KIO memberikan manfaat yang sudah baik dan signifikan, hal ini ditinjau dari fleksibilitas kerja dan meningkatkan efisiensi operasional. Penerapan *e-Government* ini mengotomatiskan proses administrasi terutama dalam pengelolaan persuratan yang dapat mengurangi waktu dan biaya operasional terkait pekerjaan administratif serta mengurangi penggunaan kertas dan penyimpanan fisik. Dengan penerapan e-government, informasi dan layanan publik menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ini meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah daerah, yang pada gilirannya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

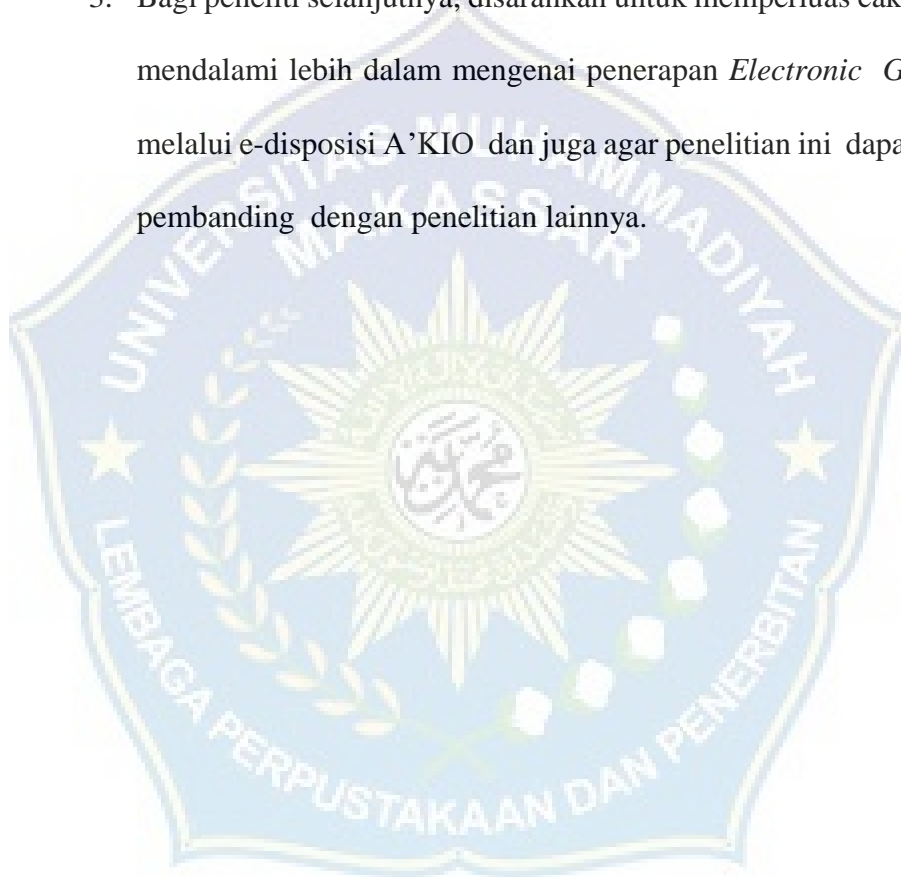
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran dan masukan:

1. Bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa untuk perlu meningkatkan fitur-fitur agar lebih memudahkan terkait penggunaan dan pengoperasian e-disposisi

A'KIO di tiap SKPD agar pelayanan terutama persuratan lebih optimal.

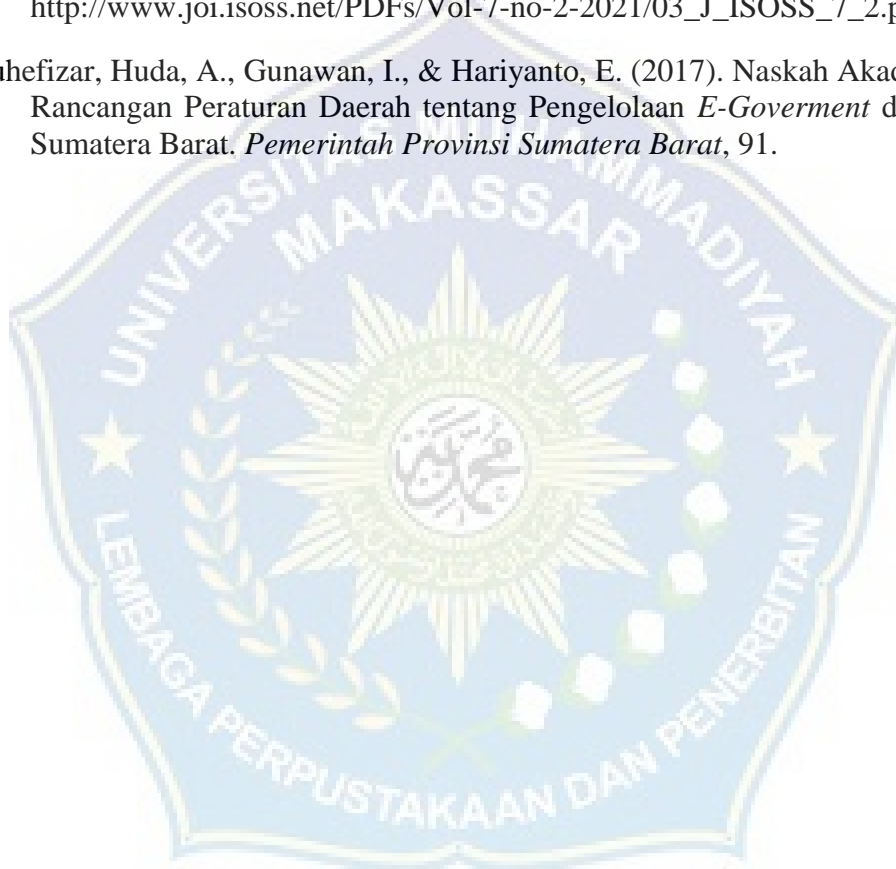
2. Bagi setiap instansi yang menggunakan e-disposisi A'KIO agar meningkatkan pelatihan karyawan dalam melakukan surat persuratan secara online
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan atau mendalami lebih dalam mengenai penerapan *Electronic Government* melalui e-disposisi A'KIO dan juga agar penelitian ini dapat menjadi pembanding dengan penelitian lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., Suwitri, S., & Yuniningsih, T. (2023). Penerapan *E-Goverment* Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 129–147. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.11255>
- Arifah , U. (2020). Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 4(2), 30–41. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.245>
- Dewi, B. P. (2020). Penerapan *Electronic Government* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 7(4), 482–492.
- Fauzy. 2015. Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa Di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012. <file:///D:/proposal/Jurnal/-political-willpemerintahkabupaten-pelalawan-terhadap-pelestarian-satwadi-tama.pdf>
- Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi *Electronic Government*. *Electronic Government*, 84, 1–166. https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government
- Lestari, L., & Zulkarnaini. (2023). Pelaksanaan *E-Goverment* melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 276–286. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7886310>
- Mariano, S. (2019). Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nadila, S. (2021). Implementasi *Electronic Government* Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Rahmaini, P. (2021). Penerapan Prinsip *E-Government* sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021. (*Journal Pd Social Science and Humanities*), 1(1), 46–51.
- Safitri, N. W. (2020). *Penerapan E-Government Di Pusat Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Kabupaten Pinrang*. Hal 15.
- Suci Pratiwi, C. (2020). Implementasi *E-Goverment* Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 2(1), 109–126. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v2i1.18>

- Syafriyani, I., & Zaituna, Y. P. (2019). Penerapan *E-Government* Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi Di Bkpsdm Kabupaten Sumenep. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n1.p28-34>
- Untari, F. (2018). *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (E-Tax)*.
- Vina Nurul Afriani. (2021). Efektivitas Implementasi *E-Government* Terhadap Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Bogor. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2). http://www.joi.isoss.net/PDFs/Vol-7-no-2-2021/03_J_ISOSS_7_2.pdf
- Yuhefizar, Huda, A., Gunawan, I., & Hariyanto, E. (2017). Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan *E-Government* di Provinsi Sumatera Barat. *Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, 91.





Lampiran Permohonan Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3999/05/C.4-VIII/III/1445/2024 28 March 2024 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 18 Ramadhan 1445
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0332/FSP/A.6-VIII/III/1445/2024 tanggal 28 Maret 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FALIQUL ISBAH

No. Stambuk : 10561 1117420

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENERAPAN ELECTRONIK GOVERMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 April 2024 s/d 3 Juni 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

Lampiran : Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 8785/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3999/05/C.4-VIII/III/1445/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD FALIQL ISBAH
Nomor Pokok	: 105611117420
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 April s/d 17 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 17 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Lampiran: Surat Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 Jl. Andi Mallombassang No. 72 Telp. (0411) 887408 Sungguminasa
 Email : diskominfo-sp@gowakab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 400.14.5.4/355/DISKOMINFO-SP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Arifuddin Saeni
 Nip : 19651231 199512 1 009
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
 Alamat : Jl. Andi Mallombassang No. 72 Sungguminasa

Menerangkan bahwa :

No.	NAMA	NOMOR POKOK	JURUSAN
1.	Muhammad Faliqul Isbah	105611117420	Ilmu Administrasi Negara

Adalah benar pernah mengadakan Penelitian pada Kantor Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Gowa dari tanggal 17 April s/d 17 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 25 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

Drs. ARIFUDDIN SAENI
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP : 196512311995121009

Tembusan Kepada Yth :

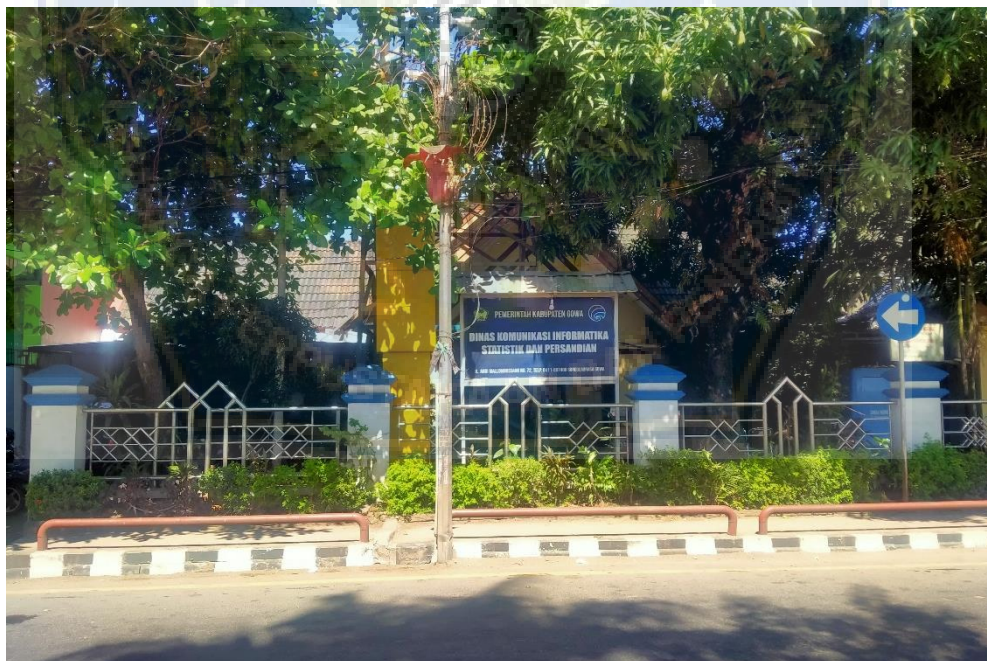
1. Bupati Gowa (sebagai laporan) di Sungguminasa;
2. Arsip.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



Lampiran: Lokasi Tempat Penelitian



Lampiran: Wawancara Bersama Informan



Wawancara bersama Ibu Sabrina Rukka, SE, Kepala Bidang Persandian



Wawancara bersama Bapak Ichwan, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Muda
pada Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi



Wawancara bersama Bapak Muhammad Ridho F. M, Pranata Komputer Ahli
Pertama



Wawancara bersama Bapak Nur Taufik Rahman, Staff/Fungsional



Wawancara bersama Ibu Rahma, Staff/Fungsional bagian umum





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Faliqul Isbah

Nim : 105611117420

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	3 %	10 %
2	Bab 2	6 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



.BAB I Muhammad Faliqul Isbah - 105611117420

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	soalterbaru.com Internet Source	1%
2	Dadan Zaliluddin, Budiman Budiman, Ade Rully. "IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BERBASIS ANDROID", JSiI (Jurnal Sistem Informasi), 2020 Publication	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	juandaislam.wordpress.com Internet Source	1%
5	rajadariusputra.wordpress.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

BAB II Muhammad Faliqul Isbah - 105611117420

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES



0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	rinaafrika.wordpress.com Internet Source		2%
2	komasmandala.blogspot.com Internet Source		1%
3	rachmatdwimulya.blogspot.com Internet Source		1%
4	nonosun.wordpress.com Internet Source		1%
5	repository.unhas.ac.id Internet Source		<1%
6	text-id.123dok.com Internet Source		<1%
7	unsri.portalgaruda.org Internet Source		<1%
8	www.bappedajakarta.go.id Internet Source		<1%
9	jia.stialanbandung.ac.id Internet Source		<1%

BAB III Muhammad Faliqul Isbah - 105611117420

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.iainambon.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB IV Muhammad Faliqul Isbah - 105611117420

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

<1%

2

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1%

3

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

<1%

4

repository.unibos.ac.id

Internet Source

<1%

5

Ari Cahyo Nugroho. "STRUKTUR JARINGAN INTERKONEKSI, TAHAPAN PEMBANGUNAN E-GOVt DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STRUKTUR JARINGAN INTERKONEKSI (Survei Tentang Interkoneksi di kalangan Aparatur Instansi pelayanan publik bidang informasi dan dokumentasi)", Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 2016

Publication

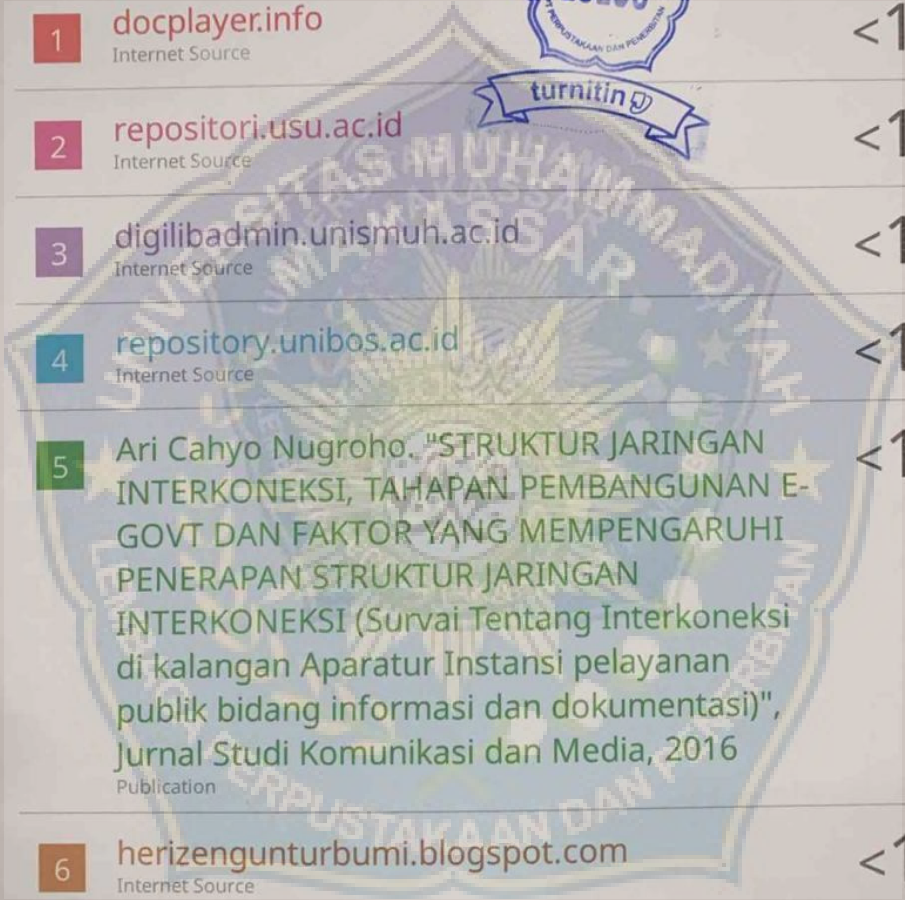
<1%

6

herizengunturbumi.blogspot.com

Internet Source

<1%

myrealblo.blogspot.com

BAB V Muhammad Faliqul Isbah - 105611117420

ORIGINALITY REPORT

0 %	0 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Faliqul Isbah lahir pada tanggal 2 Mei 2002 di Makassar. Penulis adalah anak pertama dari tujuh bersaudara, dari pasangan Abdul Majid dan Darmiah. Penulis pertama kali bersekolah di SD Inpres Bakung 2 dan tamat pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Sungguminasa dan lulus pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Somba Opu, dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2024, penulis menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) dengan judul skripsi "Penerapan *Electronic Goverment* A'KIO pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa".